



**PUTUSAN**

Nomor 149/Pdt.G/2022/PA. Bsk.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Sungai Tarab, 01 Januari 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Datar, sebagai **Penggugat**;

lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Luak Gadang, 28 Agustus 1979, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Datar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti surat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Maret 2022 yang telah didaftar dalam register perkara Nomor 149/Pdt.G/2022/PA. Bsk, mengemukakan dalil-dalilnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 03 September 2021 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0189/005/IX/2021, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA di Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 03 September 2021;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kabupaten Sijunjung, sampai berpisah;

*Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 149/Pdt.G/2022/PA. Bsk.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat bersama Tergugat telah berjalan selama 5 bulan 27 hari, sedangkan yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 6 hari, dan selama 6 hari tersebut sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, awal perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 5 September 2021 yang disebabkan oleh :
  - 4.1 Tergugat tidak bertanggung jawab sering mengabaikan Penggugat dari segi nafkah lahir dan batin;
  - 4.2 Tergugat tidak menghargai anak Penggugat dari suami pertama dengan selalu memandangi paha anak gadis Penggugat;
  - 4.3 Tergugat telah menuduh Penggugat berselingkuh dengan sopir mobil yang sudah menjadi langganan Penggugat;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 9 September 2021 Tergugat telah pergi dari rumah kontrakan di Kabupaten Sijunjung yang disebabkan saat itu Penggugat sedang menelpon sopir langganan Penggugat untuk menjemput barang yang akan dikirim ke kampung, namun Tergugat marah-marah lalu Tergugat langsung pergi dari rumah kontrakan di Kabupaten Sijunjung, tanpa ada alasan yang jelas dari Tergugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 9 September 2021 tersebut sampai sekarang;
6. Bahwa pada saat ini Penggugat berdomisili di Kabupaten Tanah Datar, sedangkan Tergugat berdomisili saat ini di Kabupaten Tanah Datar;
7. Bahwa Penggugat sendiri dan pihak keluarga telah berusaha menyusun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat adalah masyarakat tidak mampu yang dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 466/27/Kesra /2022, tanggal 02 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari di Kabupaten Tanah Datar, dan Penggugat telah mendapatkan izin oleh

**Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 149/Pdt.G/2022/PA.Bsk.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Batusangkar untuk dapat berperkara secara Cuma-Cuma dengan Surat Pertimbangan Sekretaris Nomor: W3-A3/666/HK.05/1/2022 tertanggal 01 Maret 2022, dan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor: W3-A3/667/HK.05/1/2022, dan surat Keputusan Nomor: W3-A3/668/HK.05/1/2022, yang semuanya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Batusangkar tertanggal 01 Maret 2022;

9. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat oleh sebab itu Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Batusangkar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Subsider:

- Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula mengirimkan orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaasnya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

**Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 149/Pdt.G/2022/PA.Bsk.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa jawaban dan tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh PPN/KUA di Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 03 September 2021, fotokopi telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode (P.);

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, hubungan ibu kandung dari Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar tahun 2021 yang lalu dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setahu saksi beberapa hari setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam kebutuhan lahir dan batin Penggugat, di samping itu Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2021 karena Tergugat telah menuduh Penggugat berselingkuh dengan sopir langganan Penggugat untuk menjemput barang yang akan Penggugat kirim ke kampung, akibat dari sikap Tergugat tersebut akhirnya Tergugat lah yang telah pergi dari tempat kediaman bersama;

*Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 149/Pdt.G/2022/PA.Bsk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan sekitar lebih kurang 6 bulan lamanya;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, hubungan bibi dari Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah 1 tahun yang lalu dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setahu saksi beberapa hari setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam kebutuhan lahir dan batin Penggugat, di samping itu Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2021 karena Tergugat telah menuduh Penggugat berselingkuh dengan sopir langganan Penggugat untuk menjemput barang yang akan Penggugat kirim ke kampung, akibat dari sikap Tergugat tersebut akhirnya Tergugat lah yang telah pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan sekitar lebih kurang 6 bulan lamanya;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga, namun tidak berhasil

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain lagi dan telah mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut serta Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya semula dan mohon putusan;

**Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 149/Pdt.G/2022/PA.Bsk.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batusangkar, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Batusangkar untuk memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara ini sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan

**Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 149/Pdt.G/2022/PA.Bsk.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang sah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan menyarankan pada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Selain itu upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa jawaban dan tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut menurut hukum Tergugat telah dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat. Namun demikian karena perkara ini tentang perceraian maka kepada Penggugat tetap diwajibkan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat serta alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan sesuai ketentuan Pasal 2

**Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 149/Pdt.G/2022/PA.Bsk.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 03 September 2021 di Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 4 dan 5, adalah fakta yang didengar sendiri serta telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang didengar dan dialami sendiri serta telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi

**Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 149/Pdt.G/2022/PA.Bsk.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak beberapa bulan saja setelah menikah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang mencukupi dalam memenuhi kebutuhan lahir dan batin Penggugat dan Tergugat, di samping itu Tergugat telah menuduh Penggugat berselingkuh dengan sopir langganan Penggugat untuk menjemput barang yang akan Penggugat kirim ke kampung, akibat dari perbuatan Tergugat tersebut akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan lebih kurang 6 bulan lamanya;
2. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 6 bulan lama sampai sekarang;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali karena sudah sulit untuk dirukunkan, apalagi Penggugat sudah tidak mau lagi untuk kembali bersatu bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 149/Pdt.G/2022/PA.Bsk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;*

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudaratannya yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sebagaimana sesuai dengan sebuah kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)”*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari kepergian Penggugat yang telah meninggalkan tempat kediaman bersama semenjak lebih kurang 6 bulan yang lalu sampai sekarang, dan kedua belah pihak keluarga tidak ada lagi berusaha untuk mencari solusi agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berbaik kembali, karena Penggugat sudah tidak mau bersatu lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan kondisi seperti tersebut di atas, maka dengan tidak lagi mempertimbangkan dari pihak mana datangnya penyebab terjadinya ketidakrukunan antara Penggugat dengan Tergugat, sudah sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

**Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 149/Pdt.G/2022/PA.Bsk.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan yakni dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Surat Pertimbangan Sekretaris Nomor: W3-A3/666/HK.05/1/2022 tertanggal 01 Maret 2022, dan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor: W3-A3/667/HK.05/1/2022, dan surat Keputusan Nomor: W3-A3/668/HK.05/1/2022, yang semuanya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Batusangkar tertanggal 01 Maret 2022, menetapkan biaya perkara atas nama Penggugat dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Batusangkar Tahun 2022;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Batusangkar tahun 2022;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syakban 1443 Hijriah oleh kami Rika Hidayati, S.Ag., M.HI., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Tiniwati AS, M.A. dan Arifdi Nahrawi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

*Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 149/Pdt.G/2022/PA.Bsk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Emilia sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

**Dra. Hj. Tiniwarti AS, M.A.**

Ketua Majelis,

ttd

**Rika Hidayati, S.Ag., M.HI.**

Hakim Anggota,

ttd

**Arifdi Nahravi, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. Emilia**

Perincian biaya:

- |                   |   |
|-------------------|---|
| 1. Pendaftaran    | - |
| 2. Proses         | - |
| 3. Panggilan      | - |
| 4. PNPB Panggilan | - |
| 5. Redaksi        | - |
| 6. Meterai        | - |
| <b>Jumlah</b>     | - |

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 149/Pdt.G/2022/PA.Bsk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)